



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14223-14231

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Tokoh Muhammadiyah dalam Konstelasi Politik Nasional di Era Reformasi

Ahmad^{1✉}, Ikhlas Hasan²

Jurusan Magister PAI, Universitas Muhammadiyah Bima

Email: ahmadlatief947@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang bercorak modern. Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, organisasi ini mencerminkan ciri-ciri gerakan Islam modern, sebagaimana disebutkan oleh Ali (1971) yang menyatakan bahwa gerakan Islam dapat dianggap moderen jika menggunakan metode organisasi. Muhammadiyah berupaya mengembalikan kehidupan umat Islam kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits, dengan semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan aktivitas organisasi. Sebagai organisasi yang sudah lama berdiri, setelah wafatnya pendiri, Muhammadiyah dipimpin oleh beberapa pemimpin yang masing-masing memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi fokus dan variasi program serta aktivitas organisasi. Kondisi ini mencerminkan adaptasi terhadap tantangan dan situasi zaman yang dihadapi oleh organisasi. Oleh karena itu, adalah wajar jika Muhammadiyah memiliki pola-pola kepemimpinan yang khas sepanjang perkembangannya.

Kata Kunci: *Peran Tokoh, Konstelasi Poilitik, Era Reformasi*

Abstract

Muhammadiyah is a modern religious social organization in Indonesia. Founded by K.H. Ahmad Dahlan in 1912 in Yogyakarta, this organization reflects the characteristics of a modern Islamic movement. According to Ali (1971), an Islamic movement can be considered modern if it employs the method of organization. Muhammadiyah strives to bring the lives of Muslims back to the Qur'an and Hadith, and this spirit is realized through various programs and organizational activities. As an established organization, after the death of its founder, Muhammadiyah was led by several leaders, each possessing unique characteristics that influenced the emphasis and variation of its programs and activities. This reflects the adaptation to the challenges and situations faced by the organization over time. Therefore, it is logical that Muhammadiyah has developed specific leadership patterns throughout its history.

Keywords: *Role of Figures, Political Constellation, Reformation Era*

PENDAHULUAN

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yang memiliki sifat modern. Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, Muhammadiyah menunjukkan ciri gerakan Islam modern dengan mengadopsi metode organisasi sejak awal berdirinya. Berdasarkan karakteristik ini, Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan keagamaan Islam yang modern (Kosasih & Suwarno, 2010). Muhammadiyah memiliki tokoh-tokoh yang tidak diragukan lagi kealiman, keilmuan dan dedikasinya terhadap negara Indonesia. Ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang tidak asing lagi diantaranya K.H Ahmad Dahlan, Buya Hamka, Ki Bagus Hadi Kusumo, Prof. Dr. H. Moh. Amien Rais. Muhammadiyah tidak pernah menggunakan politik yang praktis setiap pelaksanaan tetapi menjalankan politik secara individu dalam setiap organisasi.

Muhammadiyah memiliki semangat untuk mengembalikan kehidupan umat Islam kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang diwujudkan melalui berbagai program dan aktivitas organisasi. Sebagai organisasi sosial keagamaan yang telah lama berdiri, setelah wafatnya pendiri, Muhammadiyah dipimpin oleh berbagai pemimpin. Setiap periode kepemimpinan memiliki karakteristik tersendiri yang mempengaruhi penekanan dan variasi dalam program serta aktivitas organisasi. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi organisasi sosial keagamaan tentunya sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Posisi netralitas politik Muhammadiyah sedikit terguncang tepat pada Orde Baru yang gagal dalam gerakan reformasinya dan hal ini, menciptakan tatangan politik yang membentuk pemerintahan baru. Presiden Soeharto turun tahta, jalur demokrasi diperluas dan masyarakat bebas menyampaikan pandangannya serta ditandai dengan protes massal terbentuk banyaknya partai politik dengan gaya ideologi yang beragam, awal dari sinilah muncul era reformasi. Era reformasi merupakan masa penataan kembali struktur-struktur pemerintahan Indonesia, periode ini menuju demokrasi yang terbuka dan liberal beriringan dengan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah (Amin & Kamaruddin, 2020).

Peran tokoh Muhammadiyah ikut serta membenahi dari orde baru menjadi era reformasi yaitu Amien Rais sebagai tokoh reformasi yang memiliki catatan adalah tokoh aktif di organisasi Muhammadiyah (Ghozali, 2022). Syafii Maarif yang merupakan tokoh pluralisme dan kemanusiaan yang merupakan tokoh aktif di organisasi Muhammadiyah. Din Syamsuddin tokoh lintas agama tingkat Nasional sampai Internasional ini juga merupakan tokoh aktif di organisasi Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah tidak diragukan lagi kontribusinya pencerdasan, kemajuan, dan perubahan kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan Peran Tokoh Muhammadiyah dalam Konstelasi Politik Nasional di Era Reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dianalisis melalui dua perspektif yaitu sejarah dan induktif. Kebenaran dipahami sebagai keteraturan yang menciptakan keamanan, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada penjabaran berikut ini (Faizin, 2014): 1) Metode sejarah di mana penelitian ini berfokus pada pola kepemimpinan Muhammadiyah, terutama dalam mengungkap perkembangan kepemimpinan dalam organisasi; dan 2) Metode Induktif sebagai prosedur untuk menarik kesimpulan umum yang didasarkan pada proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau konkret.

KERANGKA KONSEPTUAL

Sejarah Muhammadiyah

Lahirnya gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang mempelopori pemurnian dan pembaruan Islam di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, didirikan oleh seorang ulama cerdas dan progresif, Kyai Haji Ahmad Dahlan dari Kauman, Yogyakarta. H. Djarnawi Hadikusuma menjelaskan bahwa anggota organisasi ini adalah umat Muhammad dengan asas ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu Islam. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjalankan agama Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang murni ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum (Amin & Kamaruddin, 2020).

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awalnya tidak lepas dari manifestasi gagasan pemikiran. Ketika menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci untuk kedua kalinya, Kyai Dahlan mulai menanamkan benih pembaruan di Tanah Air. Gagasan pembaruan ini didapatkan setelah berguru pada ulama-ulama Indonesia di Mekkah seperti Syeikh Ahmad Khatib, Kyai Nawawi, Kyai Mas Abdullah, dan Kyai Fakhri, serta melalui pembacaan karya-karya pemikir Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dengan kecerdasan dan interaksi selama di Saudi Arabia, serta pembacaan atas karya-karya tersebut, Kyai Dahlan mengembangkan ide-ide pembaruan.

Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai organisasi untuk mewujudkan gagasan ini merupakan hasil interaksi Kyai Dahlan dengan Boedi Oetomo, yang tertarik dengan ajaran agama yang diajarkannya, serta R. Budihardjo dan R. Sosrosugondo (Ibrahim, 2008). Gagasan ini juga merupakan saran dari seorang siswa Kyai Dahlan di Kweekscholl Jetis, yang

sering datang ke rumahnya dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintisnya tidak diurus sendiri, melainkan oleh suatu organisasi agar ada kesinambungan setelah Kyai Dahlan wafat (Mu'ti, 2016).

Secara praktis, organisasi ini dibentuk untuk mewadahi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang didirikan pada 1 Desember 1911. Sekolah ini, yang dikembangkan oleh Kyai Dahlan secara informal, memberikan pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum di lingkungannya. Djarnawi Hadikusuma mencatat bahwa sekolah Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1911 di Kauman, Yogyakarta adalah sebuah sekolah agama yang menggunakan metode baru, dengan meja dan papan tulis, serta mengajarkan ilmu umum. Pada 18 November 1912 Miladiyah, bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah, di Yogyakarta dibentuklah organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini resmi disahkan pada 20 Desember 1912 dan Statuten Muhammadiyah disetujui oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Statuten Muhammadiyah pertama itu mencantumkan tanggal resmi 18 November 1912, tanpa mencantumkan tanggal Hijriyah.

Politik Nasional di Era Reformasi

Perubahan politik pada tahun 1998, yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, membawa dampak luas, salah satunya adalah kembalinya demokrasi dalam kehidupan politik bernegara. Pemilu yang benar-benar LUBER terjadi pada tahun 1999 dan diikuti oleh 48 partai politik. Demokratisasi ini menyebabkan perubahan mendasar dalam hubungan antara Presiden dan DPR (Madani, 2023). Seandainya DPR didahulukan sebagai stempel, kini mereka mengawasi presiden. Di sini dicoba mengumumkan model atau format politik yang tidak lagi membebani secara administratif seperti pada masa Orde Baru, tetapi juga tidak terlalu legislatif seperti pada masa orde lama atau demokrasi parlementer yang memiliki stigma negatif.

Jika ide dasarnya demikian, sistem presidensial dengan sistem multi-partai yang seimbang seharusnya membentuk parlemen yang bekerja di bawah pengawasan Presiden. Kombinasi sistem presidensial dan multi-partai sebenarnya adalah jawaban atas pelajaran dari masa lalu. Namun, respons ini bukannya tanpa masalah baru. Para ahli perbandingan politik seperti Scott Mainwaring, Juan Linz, dan Arturo Valensuela (Juan Linz dan Arturo Valensuela, 1994, p. 6-8) menyatakan bahwa sistem ini memiliki tiga kelemahan utama. Pertama, kemungkinan munculnya kelumpuhan atau kebuntuan pemerintahan akibat konflik eksekutif-legislatif. Jika setiap pihak merasa mendapat legitimasi dari rakyat (*double* legitimasi), dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan DPR atau parlemen (HR & Harakan, 2017).

Kebuntuan politik dalam sistem politik pasca-Trias dapat menyebabkan pemerintahan terpecah, di mana presiden dan DPR berada di bawah kendali partai politik yang berbeda. Kedua, kekakuan sistem presidensial merupakan konsekuensi dari kekuasaan dewan yang terbatas, sehingga tidak ada kemungkinan mengganti presiden di tengah jalan jika kinerjanya tidak memuaskan masyarakat. Ketiga, prinsip pemenang mengambil semua yang melekat pada sistem presidensial memberi presiden peluang untuk mengklaim legitimasi politik atas nama rakyat, bukan atas nama lembaga parlemen (DPR) atau partai politik yang berkuasa (Muksin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan reformasi sering dianggap sebagai "titik awal" utama keterbukaan politik di Indonesia. Reformasi adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan dunia yang terbuka dan demokratis, seolah-olah bisa berjalan dengan baik (Muksin, 2018). Orde Lama diidentikkan dengan Presiden Soekarno, Orde Baru dengan Presiden Soeharto, dan era reformasi sering dihubungkan dengan Muhammad Amien Rais. Amien Rais menjadi tokoh sentral dalam gerakan reformasi yang didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa. Gerakan ini merupakan gerakan sosial kerakyatan (people power) sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Presiden Soeharto (Mu'ti, 2016).

Muhammad Amien Rais lahir pada 26 April 1944 di Solo dengan nama kecil Mohammad Amien. Ia berasal dari keluarga dengan tradisi keislaman Muhammadiyah yang kuat. Amien Rais dibesarkan dalam keluarga yang aktif dan religius bersama saudara-saudaranya. Ayahnya, Syuhud Rais, adalah seorang aktivis yang berlatar belakang pendidikan dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, sekolah kader Muhammadiyah tertua dan terkemuka di Yogyakarta. Syuhud Rais berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, ibu Amien Rais, Ny. Sudalmiyah, juga seorang aktivis perempuan Islam dengan latar belakang Muhammadiyah yang kuat (Permana et al., 2010).

Sejak muda, Amien Rais mendapatkan perhatian khusus dari keluarganya di bidang keagamaan dan Muhammadiyah. Ini terlihat dari riwayat pendidikan Amien yang selalu terkait dengan sekolah agama dan Muhammadiyah. Sejak kecil, ia sudah bergabung dengan organisasi kepanduan Muhammadiyah, Hizbul Wathan. Selain sekolah formal, Amien Rais juga sempat nyantri di pesantren dengan tradisi keislaman. Ketika dewasa, ia pernah menjadi pemimpin di IMM, menjadi ketua III DPP IMM, dan wakil ketua LDMI HMI. Pada masa selanjutnya, Amien Rais mengenal tiga jenis kepemimpinan: kepemimpinan di Muhammadiyah, kepemimpinan di partai politik, dan kepemimpinan di lembaga tinggi MPR pada masa itu (Monica, 2020).

Amien Rais menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh, meskipun tidak selesai masa jabatan karena tiga tahun kemudian ia harus meninggalkan PP Muhammadiyah untuk memimpin PAN, yang juga merupakan amanat Sidang Tanwir Muhammadiyah (Ekawati, 2019). Sidang Tanwir Muhammadiyah 1998 di Semarang mengamanatkan Amien Rais untuk melakukan ijtihad politik tanpa melupakan prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, untuk mencari kemungkinan mendirikan sebuah partai politik yang bisa membawa aspirasi reformasi. Amien Rais termasuk intelektual muda yang cepat melesat dalam percaturan pemikiran di Indonesia.

Gagasan dan alur pemikiran Amien Rais bertujuan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang didasarkan pada ajaran tauhid. Ia menerapkan ajaran demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan berwibawa melalui pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sidang Tanwir Muhammadiyah memperkenalkan wacana suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1993, ketika kekuasaan politik Presiden Soeharto masih kuat. Pernyataan berani dari Amien Rais ini menjadi pendorong kebijakan nasional untuk melawan kekuatan Orde Baru yang akan segera digulingkan. Masyarakat menjadi lebih berani untuk melawan tekanan politik, korupsi, dan ketidakadilan yang mereka alami. Pada masa Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi simbol pemerintahan yang berkuasa selama 32 tahun (Nuraida, 2015). Secara historis, hubungan antara Muhammadiyah dan negara bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan orientasi para aktor di dalamnya. Ada tiga jenis hubungan antara Muhammadiyah dan negara sepanjang sejarahnya.

- 1) Pertama, model relasi di mana Muhammadiyah tidak mencampuri urusan politik, yang diadopsi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi yang dipimpin Ahmad Dahlan ini tidak terjerumus pada pilihan antara gerakan kooperatif dan non-kooperatif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sikap akomodatif ini juga diterapkan pada masa pasca Orde Baru (Amin & Kamaruddin, 2020);
- 2) Kedua, model hubungan Muhammadiyah yang tunduk kepada negara, terlihat jelas pada masa pendudukan Jepang yang sangat militeristik. Muhammadiyah melihat aktor negara sebagai organisasi pemaksa yang mendisiplinkan masyarakat melalui kekerasan (Nisa, 2019). Pola ini juga terjadi pada akhir Orde Lama dan dekade-dekade pertama Orde Baru, ketika kekuatan sosial politik di luar negara terpinggirkan;
- 3) Ketiga, model relasi Muhammadiyah yang masuk ke dalam ranah negara, terlihat dari keterlibatan dalam pembentukan partai politik (Masyumi), mendirikan partai politik (PAN), hingga berperan aktif dalam menentukan haluan negara. Pada masa Reformasi, Muhammadiyah memainkan peran non-politik yang strategis dalam masyarakat sipil,

khususnya pada masa Amien Rais, Buya Syafii, dan Din Syamsuddin. Pada awal tahun 2003, Buya Syafii menyatakan bahwa Amien berjasa dalam melepaskan Muhammadiyah dari ketergantungan negara agar bisa sejajar dengan negara (Rabbani, 2020).

Tujuan akhir gerakan Reformasi adalah kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai bila rakyat berdaulat penuh. Kedaulatan rakyat bisa terwujud jika mekanisme demokrasi dijalankan dengan benar. Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam, dan demokrasi adalah sistem bernegara yang paling tepat untuk masyarakat yang beraneka ragam seperti Indonesia (Wibowo et al., 2020). Karena itu, Amien tampil di depan untuk memperjuangkan demokrasi melalui gerakan Reformasi. Sebagai intelektual Islam dan ilmuwan politik, Amien Rais produktif dalam menuangkan gagasan-gagasannya. Ia telah menghasilkan karya-karya seperti "Cakrawala Islam", "Keajaiban Kekuasaan", "Moralitas Muhammadiyah", "Visi Misi Muhammadiyah", dan lain-lain. Hingga kini, Amien Rais merupakan salah satu pakar di Indonesia yang mendalami masalah Timur Tengah (Mayrudin & Akbar, 2019). Pakar dari Universitas Gajah Mada ini menjadi intelektual pertama yang memimpin Muhammadiyah, organisasi keagamaan "modernis" terbesar di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, pola kepemimpinan Muhammadiyah pada masa awal perkembangannya cenderung bersifat kharismatik. Kepemimpinan didasarkan pada kewibawaan pribadi. Perkembangan organisasi Muhammadiyah kemudian memiliki pola kepemimpinan yang bersifat legal-rasional. Pemimpin Muhammadiyah diangkat bukan semata-mata berdasarkan kewibawaan, tetapi juga faktor keahlian. Berdasarkan keahlian keulamaan dan intelektualitas, pola kepemimpinan Muhammadiyah pada masa awal perkembangannya cenderung dipimpin oleh tokoh ulama intelektual (Ghozali, 2022). Hal ini wajar mengingat Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan. Namun, dalam perkembangannya, Muhammadiyah dipimpin oleh figur intelektual ulama. Sebagai akademisi atau dosen di perguruan tinggi, kondisi ini tentu sangat mempengaruhi model kepemimpinan yang dikembangkan, sehingga menambah nilai legal-rasional dalam pola kepemimpinan. Kepemimpinan di Muhammadiyah sangat dinamis, terlihat dari beragamnya tokoh yang pernah memimpin organisasi ini. Selain itu, masa kepemimpinan mereka relatif pendek, biasanya hanya satu atau dua periode (Miski, 2022).

SIMPULAN

Pola kepemimpinan Muhammadiyah pada masa-masa awal perkembangannya, dari era K.H. Ahmad Dahlan hingga Amien Rais, cenderung bersifat kharismatik. Kepemimpinan pada periode ini lebih didasarkan pada kewibawaan pribadi sebagai seorang ulama

intelektual. Pada tahun 1990-an, pola kepemimpinan Muhammadiyah berubah menjadi lebih legal-rasional. Selama periode ini, Muhammadiyah dipimpin oleh figur-figur intelektual akademis yang juga memiliki wawasan keulamaan. Dilihat dari dinamika kepemimpinan, Muhammadiyah menunjukkan karakteristik yang sangat dinamis. Hal ini terlihat dari beragamnya tokoh yang pernah memimpin organisasi serta singkatnya masa kepemimpinan, yang biasanya hanya berlangsung satu atau dua periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. R., & Kamaruddin. (2020). Gerakan Sosial Muhammadiyah di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 1(1), 36–45.
- Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 160.
- Faizin. (2014). Perspektif Pemikiran Politik Islam. *Suatu Analisis Pendahuluan Pemikiran Politik Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, 12, 65–78.
- Ghozali, I. (2022). Pola Kepemimpinan Organisasi Muhammadiyah Imam. *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 05(01).
- HR, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).
- Ibrahim, M. (2008). *Dinamika Pembinaan Peradilan di Indonesia Studi Terhadap Peradilan Agama Pada Era Reformasi*. 2, 282.
- Kosasih, A. D., & Suwarno. (2010). Pola Kepemimpinan Organisasi Muhammadiyah. *Islamadina*, IX(1), 30–46.
- Madani, A. (2023). KONSEP ELITE POLITIK Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah. In *Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*.
- Mayrudin, Y. M., & Akbar, M. C. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam : Studi tentang PAN, PKB dan PKS. *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 169–186.
- Miski, M. (2022). Membangun Image Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 10(1), 89.
- Monica, O. (2020). *Relasi Antara Agama Dan Politik (Studi Kasus Partai Amanat Nasional (PAN) Wilayah Kota Banda Aceh)*.
- Mu'ti, A. (2016). Akar Pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah. *Afkaruna*, 12(1), 1–42.
- Muksin, A. (2018). Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 777–788.

- Nisa, P. K. (2019). Karakteristik Budaya Komunikasi Politik Elite Muhammadiyah. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 1(1), 99–122.
- Nuraida. (2015). Gerakan Radikalisme Islam Di Indonesia. *Wardah*, 12(2), 153–162.
- Permana, S., Abangan-Santri, K., Orde, P., Di, B., & Jawa, P. (2010). Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1), 63–82.
- Rabbani, H. (2020). Kekerasan Politik Atas Nama Agama Dan Peran Kyai Dalam Konstelasi Politik Daerah: Menelusuri Akar Konflik Jepara 7 Juli 1998. *Harmoni*, 19(2), 311–337.
- Wibowo, A. P., Djuyandi, Y., & Agustino, L. (2020). Peran Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Pancasila Di Universitas Muhammadiyah Malang. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 191–204.